



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Untuk itulah, di dalam menjalankan bisnis betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari.¹ Eksistensi perjanjian atau kontrak bernilai urgen bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Aturan main dalam pemenuhan kebutuhan dengan melibatkan orang lain haruslah jelas dan dewasa ini perlu dituangkan dalam suatu kontrak yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak. Sehingga dapatlah dipahami apabila kontrak dikatakan sebagai sarana sosial dalam

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Cet II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 27.

peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.² Hal itu sesuai dengan pendapat Apeldoorn yang menyatakan bahwa perjanjian adalah salah satu faktor yang membantu pembentukan hukum.³

Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap, dan terlalu luas. Hal itu disebabkan karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.⁵ Padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Adanya asas kebebasan berkontrak yang memperbolehkan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Artinya kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

² Alamsyah, *Klausula Eksepsi Dalam Kontrak Batu Syaria*, hal 1

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta Liberty, 2003), 7.

⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. VII; Jakarta, Sinar Grafika, 2007), 328.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Cet. II; Bandung, PT Alumni, 2005), 18.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdota pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUHPerdota itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama.⁶

sistem modern pada dewasa ini, kebebasan berkontrak tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (*statutory prohibition*), tetapi juga oleh *extra legal standart*.⁷ Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”. Mengenai hal itu Abdul Kadir Muhammad menyatakan: “Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu”.⁸ Dengan demikian, Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau lebih dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari’ah khususnya *Baitul Maal Wat*

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), 55.

⁷ *Extra legal standart* merupakan standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Lihat dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Cet. II; Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 125.

⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 125.

Tanwil (BMT) menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang kurang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling mengeksploitasi satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Secara definitif *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu, *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah, sehingga, keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁹

Lahirnya keuangan lembaga syari'ah (LKS) yang secara tegas menolak terhadap pelanggaran riba (bunga). Sebagian Ulama' menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Dengan kata lain, salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Cet. I, Ed. 4; Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 103.

untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dengan menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil baik secara mudharabah maupun musyarakah kepada masyarakat. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada pembiayaan mudharabah sebagai bentuk perjanjian kerjasama *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Kec Klampis Bangkalan dengan Nasabahnya. Dalam konsep muamalah, perjanjian atau akad *mudharabah* (*profit and loss sharing*) merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba. Tetapi, secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelelola.¹⁰ Berbicara tentang kerjasama ini tentunya dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/ shahibul maal*) dengan pelaku usaha yang terlebih dahulu didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat. Adapun keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Umumnya model perjanjian pembiayaan yang dipakai oleh pihak *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) dewasa ini adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya. Artinya, perjanjian di dalam

¹⁰ Heri Sudarsono, *Op. Cit*, 76.

transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainya untuk melakukan negosiasi syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak-kontrak standart yang disodorkan oleh pihak kreditur (BMT) atas dasar “*take it or leave it*”. Sehingga tiada kesempatan bagi pihak debitur untuk menentukan syarat-syaratnya.¹¹ Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya.

Hukum menurut filosofinya diciptakan untuk manusia dan titik orientasi hukum adalah bertugas untuk melayani manusia. Sebab itulah, hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Penerbitan standar kontrak sebenarnya merupakan upaya pelayanan praktis, cepat, efisien dan efektif dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam hubungan ini, pihak BMT sebagai lembaga keuangan syari’ah non bank yang menyediakan pembiayaan mudharabah berusaha dengan asas kebebasan berkontrak itu telah menawarkan bentuk atau model kontrak standar untuk diterima oleh nasabah atau masyarakat.

Kendati demikian, pada kenyataannya nasabah atau masyarakat tidak bisa berbuat lain kecuali menerima model kontrak standar tersebut, karena memang

¹¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Cet. I; Bandung: Tim Alumni, 1992), 180.

pada dasarnya nasabah atau masyarakat tidak memiliki pengetahuan ilmu hukum selain masalah-masalah kepraktisan di atas, sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam penerbitan standar kontrak. Dengan cara ini sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap asas kesepakatan karena standar kontrak dibuat sepihak, dan pihak lainnya hanya tinggal menandatangani tanpa harus membaca, mempelajari atau merubah isi kontrak tersebut apabila ada bagian-bagian dalam isi kontrak standar tersebut yang belum disepakati. Penyalahgunaan keadaan ini, atas ketidaktahuan atau ketidakmengertian nasabah atau masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum serta memanfaatkan masalah-masalah kepraktisan sebagai alasan untuk menerbitkan kontrak standar.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas itulah untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam mengingat begitu pentingnya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian dengan objek pembiayaan mudharabah, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul:

“Penerapan Asas-asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam prakteknya tidak lagi tampil dalam bentuknya yang utuh. Hal itu dilakukan karena upaya pelayanan praktis, cepat, efisien dan efektif. Disamping itu, tidak dipungkiri masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai seluk-beluk perjanjian sehingga ketidaktahuan atau ketidakmengertian mereka kontrak sudah disiapkan dengan bentuk baku. Oleh karena itu, guna mempermudah dalam peparan data dan analisisnya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan pihak *Baitul mal wat tamwil* (BMT) Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan dan nasabahnya tentang asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan pihak BMT UGT Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan dan nasabahnya tentang asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah*.

2. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau memperluas khazanah pengetahuan penulis maupun pembaca terkait dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah*.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi Praktisi maupun Masyarakat pada umumnya tentang pentingnya Asas Kebebasan Berkontrak dalam setiap melakukan Perjanjian, khususnya dalam melakukan pembiayaan di BMT.
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam institusi atau lembaga yang bersangkutan dan lembaga keuangan syari'ah lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab pendahuluan sedikit dijelaskan probelematika tentang “penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan”. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini mampu memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang

ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan. Dalam kajian teori ini, yang memuat tentang: asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian pembiayaan mudharabah yang mencakup beberapa aspek yakni; teori-teori tentang perjanjian, pembiayaan *mudharabah* (*profit and loss sharing*) mengenai *baitul maal wat tanwil* (BMT).

Bab III : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Sejauh ini, peneliti dalam melakukan penelitian tentang “penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan” telah berupaya semaksimal mungkin agar terhindar dari kefatalan dalam melakukan penelitian. Adapun komposisi yang diambil dalam metode

penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, pendekatan dan sumber data serta tehnik pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk Mendiskripsikan tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: Deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, Profil, visi dan misi lembaga serta struktur lembaga BMT. Disamping jua dalam bab ini terdapat analisis dari data-data yang sudah diolah untu diinterpretasikan lebih mendalam lagi.

Bab V : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkafer dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca.